

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 156TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN STATUS AKREDITASI  
LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPPBJ) TAHUN 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan akreditasi terhadap LPPBJ;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan akreditasi kepada LPPBJ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Status Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 662);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPPBJ) TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan status akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi yang masa berlakunya sesuai dengan peringkat akreditasi.
- KETIGA : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan, akan diberikan sanksi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Surakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur;
8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN  
STATUS AKREDITASI LEMBAGA  
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA  
(LPPBJ) TAHUN 2019

NOMOR : 156 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 Mei 2019

DAFTAR LPPBJ TERAKREDITASI

NO.	NAMA LEMBAGA	LOKASI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
1.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku	Ambon	Terakreditasi A	April 2019 s.d April 2024
2.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	Terakreditasi A	April 2019 s.d April 2024
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Terakreditasi B	April 2019 s.d April 2023
4.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Surakarta	Surakarta	Terakreditasi B	April 2019 s.d April 2023
5.	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur	Terakreditasi B	April 2019 s.d April 2023
6.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Bogor	Terakreditasi B	April 2019 s.d April 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO